

DAMPAK DANA TRANSFER TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU

Oleh : Taryono dan Syapsan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dana transfer terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dan mengidentifikasi dampak dana transfer terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 12 wilayah yaitu 2 kota dan 10 kabupaten. Data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang berupa data golongan pengeluaran perkapita penduduk, persentase penduduk miskin, dan data penerimaan dana perimbangan kabupaten/kota. Metode analisis siklus kemajuan kinerja digunakan untuk membandingkan dana perimbangan (dana transfer) dengan laju pertumbuhan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang menerima dana transfer diatas rata-rata Provinsi Riau sebagian besar kinerja penurunan kemiskinannya dibawah Provinsi Riau dengan dengan kinerja penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat diatas rata-rata Provinsi Riau yaitu Kabupaten Siak dan Rokan Hilir. Kabupaten/kota yang perlu mendapat prioritas utama dalam kebijakan penurunan kemiskinan adalah yang berada pada kuadran ke-3 yaitu Pekanbaru, Dumai dan Pelalawan. Sedangkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yaitu Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Keyword : Pendapatan perkapita, kemiskinan, distribusi pendapatan

A. PENDAHULUAN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Daerah juga berhak untuk menerima dana transfer atau Dana Perimbangan yang merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang berarti pula terjadinya progres dalam penurunan tingkat kemiskinan. Melalui otonomi daerah, dimana setiap daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan kemampuan finansial yang lebih baik diharapkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat akan semakin meningkat.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Riau pada tahun 2001 yang dijadikan dasar dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebanyak 807.000 jiwa. Sedangkan menurut publikasi BPS, jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau pada September 2011 adalah 472.450 jiwa atau 8,17 persen dari total penduduk Provinsi Riau. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2011 sebesar 472.450 jiwa (8,17 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 482.050 jiwa (8,47 persen), penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 0,30 persen. Selama periode Maret 2011-September 2011, penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan sebesar 9.600 jiwa. Penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 5.820 jiwa, sedangkan di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 3.780 jiwa. Pada tahun 2001 Provinsi Riau mendapatkan DAU sebesar Rp. 251,94 milyar, DAK sebesar Rp. 81,673 milyar, dan DBH sebesar Rp. 924.177,98 juta. Pada tahun 2008 jumlah DAU yang diterima Provinsi Riau sebesar Rp. 198,38 milyar.

B. METODELOGI

Metodologi ini merangkumi wilayah penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan.

1. Wilayah Penelitian

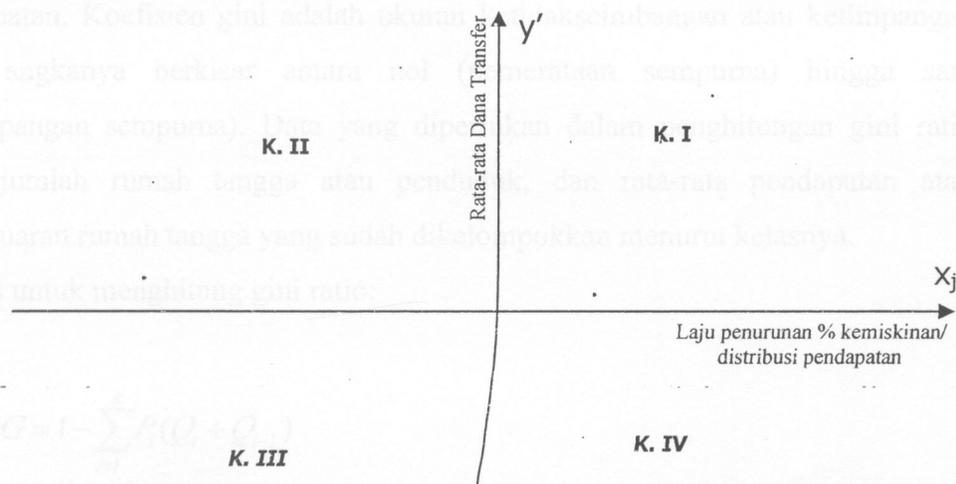
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 11 wilayah yaitu 2 kota dan 9 kabupaten.

2. Jenis dan Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam kajian ini ialah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi/lembaga lainnya. Misalnya seperti data golongan pengeluaran perkapita penduduk, persentase penduduk miskin, dan data penerimaan dana perimbangan kabupaten/kota.

3. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian tinjauan (*explorative*) yang dalam pernyataan masalah tidak memiliki hipotesis dan analisis eksplanasi (*explanation analytical*) yang menguraikan berbagai hubungan antara variabel. Untuk memperoleh jawaban objektif penelitian, maka metode analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dengan dana transfer (Dana Perimbangan). Bidang datar (x) menggambarkan laju penurunan tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan (indeks gini) sedangkan bidang tegak lurus (y) menggambarkan perkembangan rata-rata dana transfer.



Pengelompokan masing-masing kuadran adalah sebagai berikut:

- I. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata dana transfer dan laju penurunan kemiskinan atau distribusi pendapatan di atas rata-rata Riau.
- II. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki dana transfer diatas rata-rata Riau dengan laju penurunan tingkat kemiskinan atau distribusi pendapatan di bawah rata-rata Riau.
- III. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki dana transfer dibawah rata-rata Riau dengan laju penurunan tingkat kemiskinan atau distribusi pendapatan dibawah rata-rata Riau.

IV. Merupakan kabupaten/kota yang memiliki dana transfer dibawah rata-rata Riau dengan laju penurunan tingkat kemiskinan atau distribusi pendapatan di diatas rata-rata Riau.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan kabupaten/kota digunakan data kemiskinan yang dipublikasi oleh BPS. Sedangkan untuk menghitung distribusi pendapatan digunakan Indeks Gini/Koefisien Gini. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Data yang diperlukan dalam penghitungan gini ratio yaitu jumlah rumah tangga atau penduduk, dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Rumus untuk menghitung gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana: P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i
 Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- ♦ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- ♦ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- ♦ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

	731.413	698.469	875.127
01. Indragiri Hulu	724.770	689.578	811.774
03. Indragiri Selatan	809.009	741.870	814.001
04. Pelalawan	553.334	655.967	670.238
05. Siak	1.580.767	1.212.058	1.146.421
06. Kampar	1.324.413	1.324.413	1.324.413
07. Rokan Hulu	550.596	711.416	764.439
08. Bengkalis	1.589.366	1.589.366	1.589.366
09. Rokan Hilir	1.324.413	1.324.413	1.324.413
10. Pekanbaru	827.978	827.978	795.978
11. Dumai	604.395	575.061	644.433
RIAU	2.635.973	2.373.504	2.386.850

Sumber: Kementerian Keuangan RI

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam tatanan ekonomi di daerah. Hasil penelitian Rahmanta (2006), menunjukkan bahwa setelah desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang lebih besar terhadap sektor produksi, institusi rumah tangga, dan nilai tambah faktor produksi dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal. Distribusi pendapatan menunjukkan terjadinya pengurangan ketimpangan pendapatan diantara golongan rumah tangga setelah desentralisasi fiskal. Penerimaan dana transfer kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terus meningkat diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduknya.

Tabel 1 : Dana Perimbangan (Transfer) Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2007-2009

KABUPATEN KOTA	Dana Transfer		
	2007	2008	2009
01. Kuantan Singingi	731.415	698.469	835.127
02. Indragiri Hulu	724.770	689.578	811.779
03. Indragiri Hilir	809.009	741.870	814.001
04. Pelalawan	555.354	655.967	670.238
05. Siak	1.380.767	1.212.058	1.146.421
06. Kampar	939.371	1.007.499	1.070.716
07. Rokan Hulu	750.596	731.416	764.459
08. Bengkalis	1.588.222	1.550.000	1.589.066
09. Rokan Hilir	1.342.490	1.229.025	1.324.413
10. Pekanbaru	822.465	829.212	795.978
11. Dumai	604.395	515.061	644.433
RIAU	2.635.973	2.373.504	2.386.850

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kampar merupakan empat Kabupaten penerima dana transfer terbesar di Provinsi Riau. Pada tahun 2007 keempat daerah tersebut menerima 51,23 persen dan pada tahun 2009 turun menjadi 49,02 persen dari total dana transfer yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sedangkan dua daerah penerima dana transfer terendah adalah Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian Usman (2006) menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal terindikasi dapat menciptakan pemerataan distribusi pendapatan, namun pengaruhnya belum terbukti nyata secara statistik. Desentralisasi fiskal juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, yang diindikasikan dengan arah koefisien negatif dan nyata. Hasil simulasi menunjukkan, dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah untuk Sektor Pertanian terbukti efektif menciptakan pemerataan distribusi pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka 2008, 2009 dan 2010

1. Kemiskinan

Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan (Suhardjo, 1997). Penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan alamnya yang miskin atau langka sumberdaya alam, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumberdaya yang ada tidak terbagi secara merata, meskipun sebenarnya jika total produksi yang dihasilkan dapat dibagi secara merata tidak akan terjadi kemiskinan. Secara umum tingkat kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Riau dari tahun 2007-2009 menunjukkan trend yang menurun. Persentase penduduk miskin Provinsi Riau turun dari 11,2 persen pada tahun 2007 menjadi 9,45 persen pada tahun 2009. Kabupaten dengan kinerja penurunan kemiskinan tertinggi adalah Rokan Hulu dengan kinerja penurunan kemiskinan sebesar 6,37 persen.

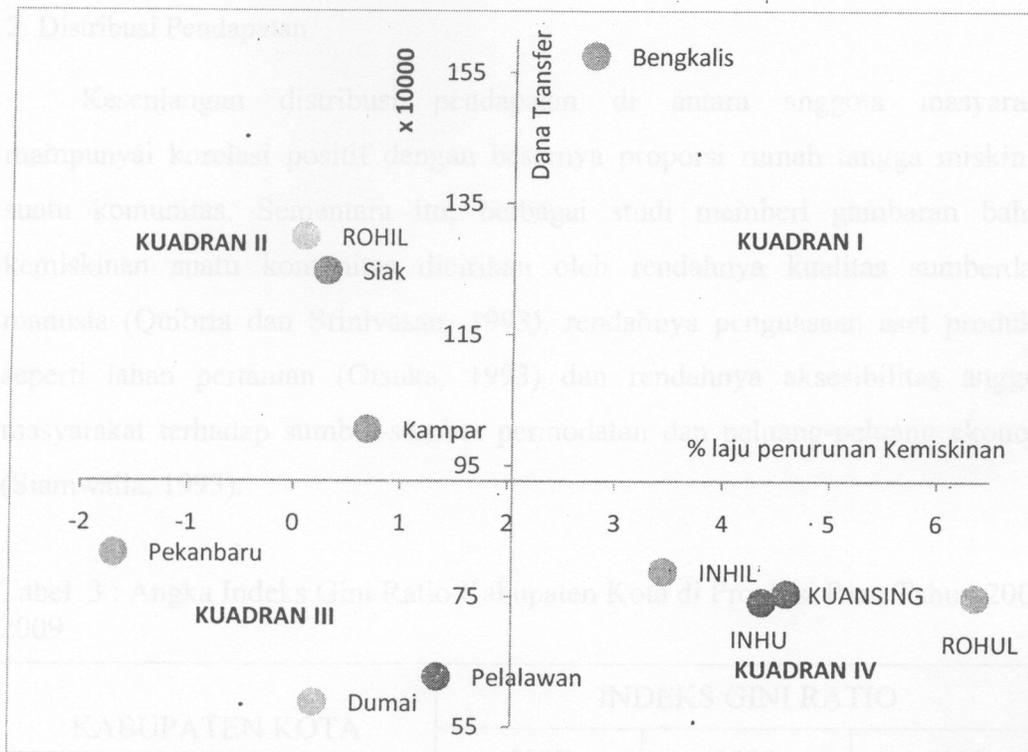
Tabel 2 : Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2007-2009

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin		
	2007	2008	2009
01. Kuantan Singingi	19,03	16,51	14,42
02. Indragiri Hulu	14,63	12,05	10,25
03. Indragiri Hilir	14,57	13,19	11,11
04. Pelalawan	18,07	18,63	16,71
05. Siak	6,01	7,09	5,71
06. Kampar	10,73	11,45	10,04
07. Rokan Hulu	21,86	18,05	15,49
08. Bengkalis*	10,69	8,94	7,91
09. Rokan Hilir	9,41	10,59	9,32
71. Pekanbaru	2,24	3,63	3,92
73. Dumai	6,28	7,42	6,08
Jumlah/Total	11,2	10,79	9,45

Sumber : BPS, Riau Dalam Angka 2008,2009 dan 2010

Kabupaten/kota yang penerima dana transfer (dana perimbangan) diatas rata-rata Provinsi Riau adalah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak dan Kampar. Dari keempat kabupaten tersebut yang mempunyai kinerja dalam penurunan tingkat kemiskinan diatas rata-rata Provinsi Riau adalah Kabupaten Bengkalis. Sementara kabupaten lainnya yang memiliki dana transfer diatas rata-rata Provinsi Riau tersebut memiliki kinerja dalam penurunan tingkat kemiskinan masih dibawah rata-rata Provinsi Riau.

Walaupun memiliki dana transfer dibawah rata-rata Provinsi Riau, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau mampu meningkatkan kinerja penurunan tingkat kemiskinan diatas capaian rata-rata penurunan kemiskinan Provinsi Riau. Kabupaten tersebut adalah Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Sedangkan Pekanbaru, Dumai dan Pelalawan merupakan kabupaten/kota yang memang memiliki dana transfer dan kinerja penurunan kemiskinan dibawah rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten/kota yang berada pada kuadran III inilah yang harus mendapat prioritas utama dalam berbagai kebijakan penurunan kemiskinan.



Gambar :

Tipologi Dana Transfer dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Lebih lanjut, Kasryno dan Suryana (1992) melihat bahwa ada dua karakteristik desa miskin, yaitu terbatasnya aset produktif seperti lahan dan kapital serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kedua karakteristik tersebut diduga merupakan kendala dalam mengaplikasikan suatu teknologi atau pemanfaatan secara optimal kesempatan-kesempatan ekonomi. Walaupun demikian, Binswanger dan Braum (1991) membuktikan bahwa secara umum dalam kondisi tertentu, perubahan teknologi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan bagi masyarakat petani yang berpenghasilan rendah, khususnya penanggulangan kemiskinan.

2. Distribusi Pendapatan

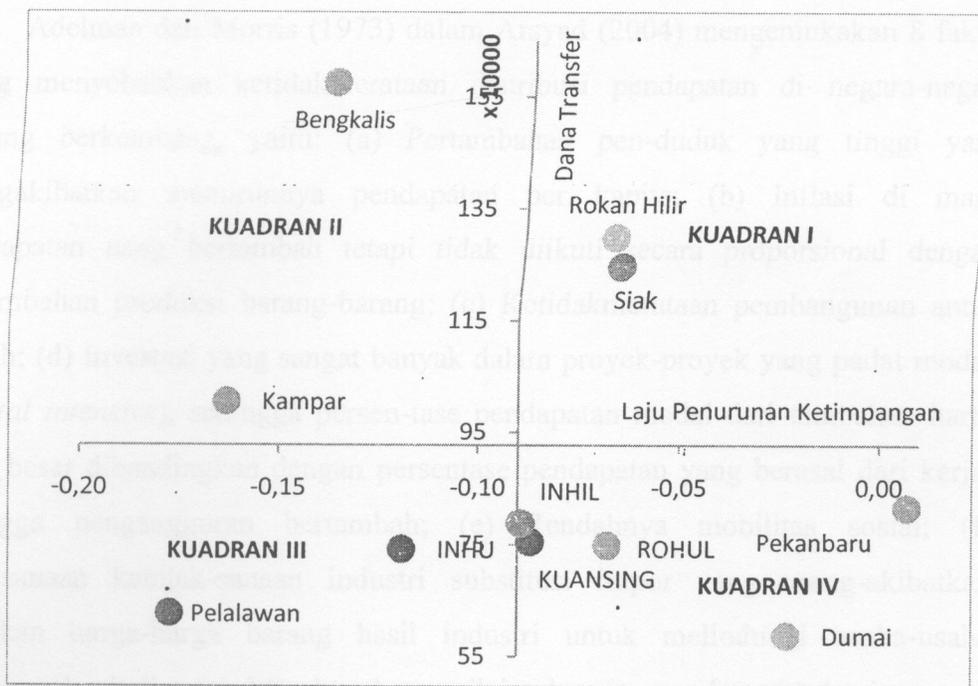
Kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat mempunyai korelasi positif dengan besarnya proporsi rumah tangga miskin di suatu komunitas. Sementara itu, berbagai studi memberi gambaran bahwa kemiskinan suatu komunitas dicirikan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Quibria dan Srinivasan, 1993), rendahnya penguasaan aset produktif seperti lahan pertanian (Otsuka, 1993) dan rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan peluang-peluang ekonomi (Siamwalla, 1993).

Tabel 3 : Angka Indeks Gini Ratio Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2008-2009

KABUPATEN KOTA	INDEKS GINI RATIO		
	2007	2008	2009
01, Kuantan Singingi	0,2514	0,4747	0,3383
02, Indragiri Hulu	0,2226	0,4344	0,3414
03, Indragiri Hilir	0,1959	0,3783	0,2851
04, Pelalawan	0,1877	0,4174	0,3649
05, Siak	0,2532	0,4107	0,3189
06, Kampar	0,2123	0,4551	0,3754
07, Rokan Hulu	0,3043	0,4492	0,3721
08, Bengkalis	0,2548	0,4207	0,3945
09, Rokan Hilir	0,2470	0,3953	0,3148
10, Pekanbaru	0,3951	0,3999	0,3881
11, Dumai	0,3511	0,4491	0,3740
RIAU	0,3060	0,4488	0,3868

Sumber : Diolah dari Susenas 2007,2008 dan 2009

Berdasarkan tipologi dana transfer dan ketimpangan distribusi pendapatan pada Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Riau dalam kategori ketimpangan rendah. Namun demikian ada kecenderungan untuk meningkat, dimana selama periode 2007-2009 indeks gini ratio Provinsi Riau meningkat dari 0,3060 menjadi 0,3868. Pada tahun 2007 kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kota Pekanbaru dengan indeks gini sebesar 0,3951 dan terendah adalah Kabupaten Pelalawan yaitu 0,1877. Pada tahun 2009 ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,3945 dan terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,2851. Berdasarkan perkembangan data indeks gini kabupaten/kota ada indikasi bahwa pada kabupaten/kota yang struktur ekonominya lebih mengarah ke sektor sekunder dan tersier, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat cenderung tinggi.



Gambar :

Tipologi Dana Transfer dan Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Berdasarkan tipologi dana transfer dan ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kabupaten yang relatif baik kinerjanya dalam pengurangan tingkat distribusi pendapatan masyarakat adalah Kabupaten Siak dan Rokan Hilir. Kedua daerah ini memiliki dana transfer diatas rata-rata Riau namun mampu menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, kabupaten/kota yang kinerja pengurangan ketimpangannya relatif baik juga adalah Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Pekanbaru dan Dumai. Walaupun memiliki dana transfer dibawah rata-rata Riau, daerah tersebut memiliki kinerja penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat diatas kinerja Provinsi Riau. Sedangkan, Bengkalis dan Kampar walaupun memiliki dana transfer diatas rata-rata Riau, kinerja penurunan ketimpangan pendapatan masyarakatnya masih dibawah Riau. Daerah yang perlu mendapat prioritas utama dalam upaya penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau adalah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persen-tase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Kabupaten/kota yang menerima dana transfer diatas rata-rata Provinsi Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kampar. Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan kinerja penurunan kemiskinan diatas rata-rata penurunan kemiskinan Provinsi Riau. Sedangkan Kabupaten Siak, Rokan Hilir dan Kampar kinerja penurunan kemiskinannya dibawah rata-rata Provinsi Riau.
- b. Kabupaten/kota yang menerima dana transfer dibawah rata-rata Provinsi Riau adalah Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu dengan kinerja penurunan kemiskinan diatas rata-rata Provinsi Riau. Sedangkan, Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Pelalawan kinerja penurunan kemiskinannya dibawah rata-rata Provinsi Riau (Kuadran III).
- c. Kabupaten/kota yang memiliki dana transfer diatas rata-rata Provinsi Riau yaitu Kabupaten Siak dan Rokan Hilir dengan kinerja penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat diatas rata-rata Provinsi Riau. Sedangkan Kabupaten Bengkalis dan Kampar kinerja penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakatnya dibawah rata-rata Provinsi Riau.
- d. Kabupaten/kota yang memiliki dana transfer dibawah rata-rata Provinsi Riau yaitu Indragiri Hilir, Kuansing, Rokan Hulu, Pekanbaru dan Dumai tapi memiliki kinerja penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat diatas Provinsi Riau. Sedangkan Pelalawan dan Indragiri Hulu kinerjanya berada dibawah rata-rata Provinsi Riau (Kuadran III).

2. Saran

Kabupaten/kota yang berada pada Kuadran III haruslah mendapat prioritas utama dalam kebijakan penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Kabupaten/kota yang menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu Pekanbaru, Dumai dan Pelalawan. Sedangkan untuk pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yaitu Pelalawan dan Indragiri Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Kasryno, F. dan A. Suryana. 1992. "Long Term Planning for Agricultural Development Related to Provert Alleviation in Rural Areas". Dalam: Pasandaran, E. *et al.* (ed). *Proverty Alleviation With Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia. Proceeding of National Seminar and Workshop*. Bogor, January 7th-10th, 1992. pp. 60-76.
- Otsuka, K. 1993. "Land Tenure and Rural Proverty". Dalam; Quibria, M.G. (ed). *Rural Proverty in Asia: Priority, Issues and Policy Options*. Oxford University Press, Hongkong.
- Quibria, M.G. dan T.N. Srinivasan. 1993. *Rural Proverty in Asia*. Oxford University Press, Hongkong
- Rahmanta. 2006. *Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan di Sumatera Utara: Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Siamwala, A. 1993. "Rural Credit and Rural Proverty". Dalam; Quibria, M.G. (ed). *Rural Proverty in Asia: Priority, Issues and Policy Options*. Oxford University Press, Hongkong. pp. 287-299
- Suhardjo, A.J. 1997. *Stratifikasi Kemiskinan dan Disribusi Pendapatan di Wilayah Pedesaan (Kasus Tiga Dusun Wilayah Karang Selatan, Gunung Merapi, Jawa Tengah*. Majalah Geografi Indonesia No. 19 Th. 11, Maret 1997, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hal. 69-86.
- Usman.2006. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan*. Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.